



**OPTIMALISASI PERAN BUMDES : EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN DI KECAMATAN TANJUNG LAGO, BANYUASIN**

Oleh

Nilam Kesuma¹, Aspahani², Asfeni Nurullah³, Iwan Efriandy⁴, Muhammad Ichsan Siregar⁵

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

^{2,3,4,5}Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

E-mail: ¹nilamkesuma@fe.unsri.ac.id

Article History:

Received: 03-11-20201

Revised: 15-12-2021

Accepted: 23-12-2021

Keywords:

Akuntansi, Laporan
Pertanggungjawaban,
BUMDES

Abstract: Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peserta mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa yang mereka peroleh sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada, peserta mampu melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa pada akhir tahun menjadi tertib, benar dan tepat waktu. Metode pelaksanaan yang dilakukan yakni melakukan edukasi dan pendampingan bersama mitra Desa Binaan Universitas Sriwijaya yaitu KTM Telang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian yang akan kami laksanakan berasal dari aparat pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tanjung Lago kabupaten Banyuasin terdiri dari Kepala Desa, Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDes. Pengurus BUMDes antusias dalam mengikuti pelatihan, serta aktif untuk berdiskusi dengan pemateri. Dengan adanya pelatihan ini pengurus BUMDes memiliki pemahaman tentang dasar Akuntansi untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pengurus BUMDes dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya, salah satunya dengan melalui laporan keuangan

PENDAHULUAN

Pada tahun 2009 telah ditetapkan sebanyak 44 Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.293/MEN/IX/2009. Salah satu KTM yang dibentuk adalah KTM Telang, Lokus yang terletak pada posisi 114°40'55,380" - 114°49'18,880" BT dan 3°6'34,038" - 3°14'38,954" LS. KTM Telang Terletak di Kabupaten Banyuasin. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Sumber Marga Telang, dan Kecamatan Makarti Jaya. Luas wilayah KTM Telang 113.783 Ha.

Berdasarkan data administratif, kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 61.223 Ha dan memiliki 15 desa yang terbagi menjadi 12 desa eks pemukiman transmigran dan 3



desa eke pemukiman marga (setempat). Pengembangan perekonomian di pedesaan telah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Pemerintah mengucurkan anggaran yang cukup banyak untuk program dana desa. Namun dana yang telah dikucurkan belum dimanfaatkan secara maksimal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu bentuk usaha yang banyak digandrungi oleh Pemerintah Desa. Hampir setiap desa memiliki niat bahkan telah mendirikan BUMDes. Namun tak sedikit juga unit usaha tersebut tidak beroperasi alias mangkrak. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program tersebut.

Sebagai pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa, pengelola BUMDes diharuskan melaporkan aktivitas dan hasil kinerja mereka setiap bulan. Berdasarkan informasi yang diberikan pejabat kecamatan setempat sampai dengan saat ini hanya ada 3 BUMdes yang aktif melakukan kegiatan operasionalnya bahkan telah membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban sudah menggunakan sistem, sedang 12 BUMDes lainnya belum melaporkan laporan pertanggung jawabannya bahkan ada yang tidak beroperasi lagi. Pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya agar 12 unit BUMDes tersebut dapat beroperasi dengan baik. Pada umumnya laporan pertanggungjawaban yang selama ini dibuat oleh para pengelola BUMDes any (untuk menggugurkan kewajiban selaku manajerial). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola, belum memadainya panduan baku dari Pemerintah terkait pencatatan keuangan BUMDes, dan kurangnya pelatihan-pelatihan yang sifatnya memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan BUMDes (Mappanyuki, 2020).

Adapun identifikasi dan perumusan masalah yang dihadapi secara khusus pada BUMDes kecamatan Tanjung Lago Kecamatan Banyuasin adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi dan perumusan masalah

Identifikasi kondisi	Permasalahan
Masyarakat belum memanfaatkan keberadaan BUMDes. Masyarakat langsung menjual hasil produksi mereka ke penadah atau konsumen akhir.	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pendirian BUMdes, sehingga sama sekali tidak memiliki kemampuan mengembangkan usaha dan banyak BUMDes yang mangkrak
1. BUMDes dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah memiliki badan hukum yang jelas dan untuk permodalan mendapat suntikan dari dana desa, namun belum ada bentuk pertanggungjawaban atas dana tersebut. 2. Pengelola BUMDes telah diberi sosialisasi dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban namun pada saat implementasi tidak dilaksanakan secara maksimal,	1. Pemahaman yang minim dari pengurus BUMDes mengenai peraturan pemerintah tentang pengelolaan BUMDes 2. Kurangnya kesiapan sumber daya manusia yang ada dalam penyusunan laporan administrasi BUMDes seperti penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban.



3. Laporan keuangan yang dimiliki tidak informatif, sehingga dapat menyebabkan si pembaca salah dalam pengambilan keputusan.	3. Minimnya pemanfaatan sistem informasi, akuntabilitas dan transparansi
--	--

Permasalahan yang dihadapi oleh badan usaha milik desa menjadi gap antara tuntutan peraturan perundangan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Solusi yang ditawarkan melalui pengabdian masyarakat ini adalah mengurangi gap antara kondisi yang dihadapi BUMDes terhadap regulasi pemerintah adalah pemberian edukasi, pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada pengelola BUMDes. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM, memberikan pemahaman kepada pengelola terkait regulasi pemerintah dan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi, akuntabilitas dan transparansi.



Gambar 1. Kerangka pemecahan masalah

Tabel 2. Kerangka Pemecahan Masalah

No	Masalah	Solusi	Tindakan
1	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pendirian BUMdes, sehingga sama sekali tidak memiliki kemampuan mengembangkan usaha dan banyak BUMDes yang mangkrak	Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui melibatkan pemudanya dalam pengelolaan BUMDes sehingga dapat menciptakan suatu inovasi	1. Pelatihan pengelolaan Usaha melalui BUMDes 2. Serta perbaikan administrasi BUMDes
2	Pemahaman yang minim dari pengurus BUMDes mengenai peraturan pemerintah tentang pengelolaan BUMDes	Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan pemerintah yang berlaku	Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan terkait pemahaman peraturan
3	Kurangnya kesiapan SDM yang ada dalam penyusunan laporan	Perlu dilakukan peningkatan Pengelola BUMDES dalam pe-	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan



	ad-ministrasi BUMDes seperti penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban.	ngelolaan usaha serta keuangan BUMDes melalui bimbingan teknis	BUMDes: meliputi; a. Perencanaan b. Penganggaran c. Pelaksanaan d. Penatausahaan e. Pelaporan Pertanggungjawaban
4	Minimnya pemanfaatan sistem informasi, akuntabilitas dan transparansi	Perlu dilakukan edukasi terkait pemanfaatan sistem informasi, akuntabilitas dan transparansi	Pemberian edukasi terkait pemanfaatan sistem informasi, akuntabilitas dan transparansi

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

- Memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam pendirian BUMDes, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan operasional BUMDes dan akan menciptakan peluang usaha baru
- Agar peserta pengabdian ini yaitu pengurus BUMDes dapat mengetahui dan memahami peraturan pemerintah terkait BUMDes
- Agar terciptanya kesiapan SDM yang ada dalam penyusunan laporan administrasi BUMDes seperti penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban.
- Agara peserta dapat memanfaatkan sistem informasi, akuntabilitas dan transparansi sehingga mampu memenuhi kewajibannya sebagai BUMDes.

METODE

Pelatihan penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban BUMDes yang dilakukan dimulai dengan tahap persiapan (pra pelatihan) yang dilakukan dengan cara observasi dan diskusi awal permasalahan yang dihadapi dalam hal pencatatan dan pelaporan. Dua sampel yang diambil yaitu BUMDes Mulia Asri dan BUMDes Merta Sari. Saat kunjungan, tim menanyakan landasan hukum keberadaan BUMdes, tujuan dan manfaat dari pendirian BUMDes dan tim juga menanyakan permasalahan yang mereka hadapi pada saat mencatat dan membukukan transaksi mereka. Selain melakukan wawancara kami melihat catatan, buku serta dokumentasi mereka terkait dengan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban.

Setelah melakukan observasi awal di dua BUMDes, kami melakukan koordinasi dengan Camat Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk melakukan pelatihan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban. Saat pelaksanaan kegiatan, tim menyusun materi terkait peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi rakyat, akuntansi dasar, kewajiban BUMDes dalam menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Pada pelaksanaan kegiatan ini metode yang digunakan adalah ceramah, tutorial, diskusi dan pendampingan langsung.

Pada tahap pelaksanaan ini tim melihat langsung saat mereka menyusun laporan keuangannya. Selain itu juga dilakukan post test untuk melihat apakah mereka bisa menerima materi dengan baik.



Setelah dilakukan pelatihan, tim melakukan pendampingan langsung dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi yaitu kembali melakukan kunjungan ke BUMDes dan melakukan beberapa perbaikan dan membantu pemecahan masalah terkait pelaporan keuangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat adalah: Community Development dan edukatif.

HASIL

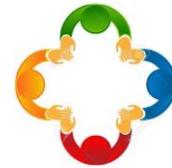
Pra pelatihan dilakukan dengan mengunjungi dua BUMDes yaitu BUMDes Mulia Asri dan BUMDes Merta Sari, pada tanggal 14 September 2021. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan permasalahan yang mereka hadapi sama yaitu kurang pemahannya mengenai cara mencatat, membukukan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan dana yang diberikan oleh desa dalam bentuk laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Bahkan, dalam menyusun laporan keuangan mereka tidak sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan akuntansi berstandar umum.

Setelah melakukan observasi awal, dilakukan koordinasi dengan Camat Tanjung Lago Kabupaten Banyuwasin untuk pelaksanaan pelatihan. Tim kemudian menyusun materi pelatihan dan membuat aplikasi akuntansi sederhana yang berbasis komputer untuk usaha dagang dan jasa bagi Bumdes, karena usaha yang banyak dikembangkan oleh Bumdes adalah Usaha dagang seperti simpan pinjam dan perdagangan.



Gambar 2. Wawancara dengan pengurus BUMDes Merta Sari, Desa bangun Sari

Kegiatan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara terstruktur dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 September 2021 bertempat di ruang serbaguna kantor Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwasin. Pelatihan dihadiri oleh 80 orang peserta yang terdiri dari pengurus BUMDes dan undangan dari kecamatan. Kegiatan PKM ini dibuka oleh Ibu Nilam kesuma selaku ketua tim. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Camat Tanjung lago dan doa. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Aspahani mengenai peran dan manfaat BUMDes serta aturan-aturan terkait tata pelaksanaan dan kewajiban BUMDes secara umum.



Gambar 3. Penyampaian materi di hari pertama

Saat menyampaikan materi, narasumber memberikan motivasi akan pentingnya BUMdes. Keberadaan BUMdes di desa dapat meningkatkan perekonomiannya sehingga tidak hanya tergantung pada satu sumber penghasilan saja. Selama ini penduduk desa hanya terfokus pada satu sumber penghasilan saja, serti hasil sawah yang merupakan produk unggulan Kecamatan tanjung Lago, hasil perkebunan, peternakan dan hasil *home industry* lainnya. Pada sesi ini pertanyaan lebih didominasi oleh Kepala Desa. Setiap kepala desa berkeinginan untuk memajukan BUMdes nya namun terbatas dengan pengetahuan yang dimiliki.

Materi dilanjutkan oleh Bapak Abdul Rohman, pakar Akuntansi BUMDes. Pada hari pertama narasumber menjelaskan pentingnya laporan keuangan dan kaporan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh BUMdes. Hal ini dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk mengukur kinerja BUMDes, mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi BUMDes , serta dapat mempertanggung-jawabkan dana yang diterima dan dibelanjakan dapat diketahui secara rinci. Narasumber menjelaskan ada tiga laporan keuangan yang harus dibuat yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Selain menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, narasumber juga memberikan penggunaan pos-pos tersebut dalam bentuk contoh transaksi yang sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari kemudian disusun dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

Dihari kedua, edukasi dan pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban dilanjutkan dengan review materi dihari pertama kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan kondisi real di BUMDes masing-masing. Pada sesi ini, peserta pelatihan diminta untuk membawa data yang ada pada perusahaan masing-masing kemudian mereka diminta untuk mengaplikasikan materi yang dia peroleh sebelumnya. Pada sesi ini, narasumbernya tetap pak Abdul Rohman yang didampingi oleh tim pengabdian lainnya yaitu ibu Nilam Kesuma, Ibu Asfeni Nurullah dan Pak Iwan Efriandy.

Pada sesi kedua ini terlihat antusias yang tinggi dari peserta karena mereka dapat



menerapkan secara langsung transaksi-transaksi yang ada di perusahaan mereka ke dalam jurnal umum sehingga jadi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Pada tahap ini, peserta pelatihan diajak *“learning by action”* dimana mereka diberikan kertas kerja kemudian mereka menyelesaikan siklus akuntansinya sesuai dengan kondisi yang ada di BUMDes mereka.



Gambar 4. Penyampaian materi di hari kedua

Evaluasi hasil kerja langsung dapat dilihat dan dianalisis. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh tim, masih banyak BUMDes yang belum memahi mengenai jurnal umum dan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.



Gambar 4. Pendampingan saat simulasi penyusunan laporan keuangan

Setelah dilakukan pelatihan, tim melanjutkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat apakah pelatihan yang diberikan memberikan manfaat untuk BUMDes atau hanya menggugurkan kewajiban. Tim juga membantu mereka untuk memperbaiki laporan keuangan mereka. Pendampingan tidak hanya sebatas kunjungan saja mereka bisa melakukan konsultasi melalui media *whatsapp*, *email*, telepon.



DISKUSI

1. Evaluasi Pengelolaan BUMDes

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian di desa. Kecamatan Tanjung Lago memiliki sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang cukup baik seperti hasil sawah, hasil kebun berupa jagug dan buah-buahan, hasil ternak, dan hasil industri rumahan lainnya. Sebanyak 15 BUMDes yang terbentuk ini didasari oleh prinsip korporatif dan partisipasi warga masing-masing desa. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes.

2. Evaluasi Kepengurusan BUMDes

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. BUMdes di kecamatan tanjung lago sebagian telah sesuai dengan PERMENDES tersebut. Jika kita lihat, 3 BUMDes yang telah berjalan dengan baik telah memiliki struktur organisasi dan *job desc* yang jelas. Namun ada juga BUMDes yang memiliki struktur organisasi tetapi kepengurusannya tidak berorientasi mencari keuntungan. Hal ini dikarenakan mereka sibuk dengan aktivitas pribadi masing-masing.

3. Evaluasi Terhadap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintah desa ataupun masyarakat. Dengan sistem ini maka keberadaan BUMDes menjadi lebih jelas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa organisasi tersebut menjadi lembaga ekonomi desa yang mampu mensejahterakan dan meningkatkan kemandirian desa.

Dari 15 BUMDes yang ada di Kecamatan Tanjung lago, baru 1 BUMDes yang telah menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik, walaupun belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu SAK ETAP. BUMDes Mertasari satu-satunya BUMDes yang telah mengelola usaha dan mencatat setiap transaksi ekonominya dan menyusunnya dalam bentuk laporan keuangan, sedangkan 14 BUMDes lainnya belum melakukan aktivitas pembukuan tersebut.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan BUMDes membutuhkan pemahaman dan kemampuan dari pengurusnya. Adanya pemahaman yang dimiliki pengurus BUMDes dapat mengoptimalkan peran BUMDes dalam menopang perekonomian suatu daerah. Setiap BUMDes di Kecamatan tanjung Lago yang dibentuk telah sesuai dengan kondisi masing-masing desa.
2. BUMDes yang terdapat di Kecamatan Tanjung Lago belum seluruhnya memiliki struktur organisasi yang jelas, selain itu, kepengurusan BUMDes sebagian masih disibukan dengan aktivitas pribadi mereka.
3. Hal yang sangat penting dalam BUMDes adalah penyusunan laporan keuangan dan



laporan pertanggungjawaban. BUMDes di Kecamatan Tanjung Lago belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih disampaikan kepada Ketua LPPM Universitas Sriwijaya dan Perangkat Pemerintah dalam hal ini adalah Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasi yang telah memfasilitasi dalam kegiatan pengabdian ini

DAFTAR REFERENSI

- [1] Banyuasin, P. K. (2017). *Data dan Informasi BUM Desa di Kawasan Transmigrasi KTM Telang*. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan: Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
- [2] Indonesia, M. T. (2009). *Keputusan menteri No. Kep.293/MEN/IX/2009 Tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi*.
- [3] Indonesia, R. (2014). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2014*. Republik Indonesia.
- [4] Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Jakarta.
- [5] Indonesia, R. (2015). *Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2015*.
- [6] Indonesia, R. (2015). *Permendes Nomor 4 Tahun 2015*.
- [7] Mappanyuki, R. (2020). Pembekalan Akuntansi BUMDes Dalam Membuat Laporan Pertanggungjawaban Lebak Banten. *Jurnal pengabdian Universitas Mercubiana*, 1.
- [8] Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDes*. Jakarta: UAI Pers.
- [9] Wibowo, D. M. (2019, Juni 11). *Mendorong Pengelolaan Bumdesa Secara Profesional*. Retrieved from www.wartaekonomi.co.id:https://www.wartaekonomi.co.id/read231487/mendorong-pengelolaan-bumdesa-secara-profesional



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN